



## Analisis Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah

Novia Olivia Elsy Logoff<sup>1</sup>, Kristian HP Lambe<sup>2</sup>, Baharuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 10-02-2025 | Review: 17-02-2025 | Revision: 23-02-2025 | Accepted: 27-02-2025

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi dengan jumlah sampel 56 pegawai BPPKAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Proses inventarisasi yang sistematis dan berkala meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan, sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, penilaian BMD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun penilaian dilakukan dengan metode yang sesuai, faktor lain seperti sistem informasi aset dan kapasitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektivitasnya. Secara simultan, inventarisasi dan penilaian BMD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, menegaskan pentingnya pengelolaan aset yang lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelolaan aset dan integrasi sistem informasi keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

**Kata kunci :** Inventarisasi, Penilaian BMD, Kualitas Laporan Keuangan

**Abstract:** This study analyzes the impact of inventory and assessment of Regional Assets (BMD) on the quality of financial reports at the Revenue, Financial Management, and Regional Asset Agency (BPPKAD) of Central Papua Province. A quantitative approach was used, employing multiple linear regression analysis. Data were collected through observation, questionnaires, and documentation, with a sample of 56 BPPKAD employees. The findings indicate that inventory has a significant positive effect on financial report quality. A systematic and periodic inventory process enhances financial report accuracy and transparency, thereby strengthening the accountability of regional financial management. Conversely, BMD assessment does not significantly influence financial report quality. Despite the use of appropriate valuation methods, other factors such as asset information systems and human resource capacity may affect its effectiveness. Simultaneously, inventory and BMD assessment positively influence financial report quality, emphasizing the need for a more comprehensive asset management approach. This study recommends enhancing asset management capacity and integrating financial information systems to improve the quality of regional financial reports

**Keywords:** Inventory, BMD Assessment, Financial Report Quality transparency

<sup>1</sup>[olivianovia71@gmail.com](mailto:olivianovia71@gmail.com)

<sup>2</sup>[kristian\\_lambe@ukipaulus.ac.id](mailto:kristian_lambe@ukipaulus.ac.id)

<sup>3</sup>[Baharuddin@ukipaulus.ac.id](mailto:Baharuddin@ukipaulus.ac.id)

## Pendahuluan

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan BMD yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada akuntabilitas pemerintah daerah. Inventarisasi dan penilaian BMD yang akurat menjadi faktor utama dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel (Ghozali, 2020). Laporan keuangan yang tidak akurat dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat, menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah (Mayasari, 2021).

Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah sering menghadapi permasalahan terkait pengelolaan aset, termasuk kesalahan pencatatan, aset yang tidak sesuai prosedur, serta penilaian yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Hery, 2022). Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pelaporan keuangan, tetapi juga memengaruhi perencanaan anggaran dan efektivitas pengelolaan sumber daya pemerintah daerah (Mangallo et al., 2025; Mangopo et al., 2025). Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik menjadi aspek krusial dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Paembonan et al., 2024; Randan et al., 2025).

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah bertanggung jawab dalam mengelola BMD agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tantangan dalam inventarisasi dan penilaian aset masih menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Inventarisasi yang tidak akurat dapat menyebabkan aset yang seharusnya tercatat menjadi tidak teridentifikasi dengan baik, sedangkan penilaian yang tidak tepat dapat mengakibatkan nilai aset yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inventarisasi dan penilaian BMD terhadap kualitas laporan keuangan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif terkait manajemen aset daerah..

## Tinjauan Literatur

Teori utama yang mendukung penelitian ini adalah teori akuntansi keuangan pemerintah, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik (Sukamulja, 2020). Teori ini menyoroti bahwa pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan (Paranoan et al., 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Inventarisasi yang baik dapat membantu dalam mencapai karakteristik tersebut dengan memastikan bahwa aset

daerah dicatat secara akurat dan dapat diaudit secara berkala (Fadillah, 2019). Inventarisasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan menghambat pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

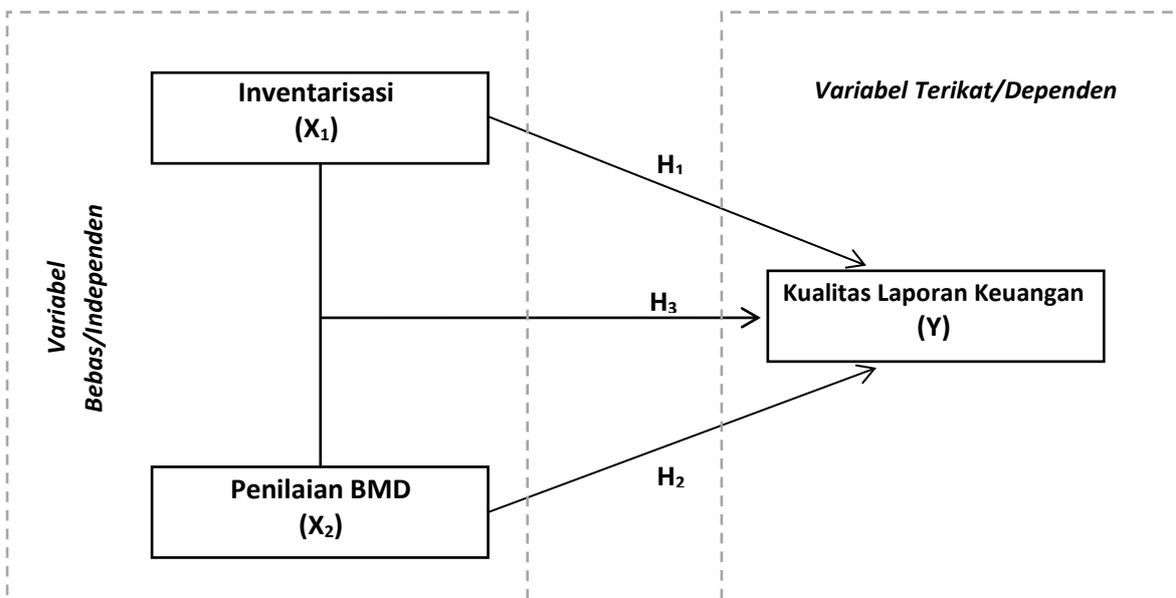
Selain itu, penilaian BMD yang sesuai dengan metode yang tepat dapat meningkatkan keakuratan nilai aset yang dilaporkan (Wijayanto, 2020). Penilaian aset yang baik juga berkontribusi dalam perencanaan anggaran daerah karena nilai aset yang tercatat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Roreng et al., 2024; Sabandar et al., 2022). Metode penilaian yang digunakan, seperti metode biaya historis atau metode nilai wajar, dapat mempengaruhi tingkat akurasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Siregar & Yulianti, 2021).

### Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menemukan bahwa daerah yang memiliki sistem inventarisasi yang terstruktur cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian oleh Santoso & Prasetyo (2019) mengungkapkan bahwa transparansi dalam proses penilaian aset berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

### Hipotesis dan Model Konseptual

Kerangka pikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan antara penilaian dan inventarisasi BMD dengan kualitas laporan keuangan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Kerangka ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait dan mencakup variabel-variabel kunci. Kerangka pikir merupakan suatu gambaran atau model yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut::



Sumber: Konsepsi penulis sendiri(2025)

Gambar 1. Kerangka Berfikir

## Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan Kerangka Pikir Penelitian diatas, maka peneliti menyusun hipotesis penelitian, dimana hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono,2019:99). Berdasarkan hubungan antara variabel dalam kerangka pikir pada penelitian diatas, selanjutnya peneliti menyusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>** : Inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Tengah.
- H<sub>2</sub>** : Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Tengah
- H<sub>3</sub>** : Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BPPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Papua Tengah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPPKAD Provinsi Papua Tengah, dengan sampel sebanyak 56 orang yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Februari 2025 di kantor BPPKAD Provinsi Papua Tengah.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas sebelum melakukan uji hipotesis..

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini mencakup pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan posisi dalam organisasi. Dari 56 responden, sebanyak 60% memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun, sementara 40% lainnya memiliki pengalaman kerja di bawah lima tahun. Dari segi pendidikan, 70% responden memiliki gelar sarjana (S1), sedangkan sisanya 30% memiliki gelar magister (S2). Posisi responden dalam organisasi terbagi menjadi staf pelaksana (50%), kepala bidang (30%), dan pejabat struktural lainnya (20%).

### Uji Statistik

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji t,**

Variabel	Koefisien Beta	t-hitung	sig.
Inventarisasi (X1)	0.512	4.352	0.000
Penilaian BMD (X2)	0.146	0.575	0.568

*Sumber: data di olah SPSS,2025*

Hasil uji t menunjukkan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai sig. < 0.05. Sebaliknya, penilaian BMD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai sig. > 0.05.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji F**

Sumber Variasi	Jumlah Kuadrat	Df	Mean Square	F-hitung	Sig.
Regresi	207.250	2	103.625	311.917	0.000
Residual	17.608	53	.332		
Total	224.857	55			

*Sumber: Data di olah SPSS,2025*

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan, inventarisasi dan penilaian BMD memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai sig. < 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan penilaian BMD. Inventarisasi yang sistematis dan terstruktur memastikan bahwa seluruh aset daerah tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Sementara itu, penilaian BMD yang tidak berpengaruh signifikan dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurangnya pemahaman mengenai metode penilaian aset atau keterbatasan sumber daya dalam melakukan evaluasi aset secara menyeluruh.

Selain itu, uji F menunjukkan bahwa inventarisasi dan penilaian BMD secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa meskipun penilaian BMD tidak signifikan secara parsial, namun dalam kombinasi dengan inventarisasi, keduanya tetap berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan daerah.

### Pembahasan Berdasarkan Hasil Penelitian

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0.000 (lebih kecil dari 0.05).

Hasil uji F (simultan) juga mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, inventarisasi dan penilaian BMD berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa semakin baik proses inventarisasi yang dilakukan, semakin akurat, transparan, dan akuntabel laporan keuangan yang dihasilkan.

### Implikasi terhadap SOP di BPPKAD

Agar hasil penelitian ini berdampak nyata, BPPKAD harus memastikan bahwa:

- a) Inventarisasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Permendagri 19/2016 dan 47/2021, termasuk pendataan berkala setiap lima tahun atau sesuai kebutuhan.
- b) Setiap aset daerah diberi label dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi potensi kehilangan atau kesalahan pencatatan aset.
- c) Sistem informasi manajemen aset terintegrasi harus digunakan untuk mempermudah proses inventarisasi dan memastikan kesesuaian antara data fisik dan pencatatan dalam laporan keuangan.
- d) Pelatihan bagi pegawai yang bertanggung jawab atas inventarisasi perlu ditingkatkan agar mereka memahami standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- e) Audit internal terhadap proses inventarisasi harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi SOP.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah, sedangkan penilaian BMD tidak berpengaruh secara signifikan. Namun, secara simultan, kedua variabel ini berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan sistem inventarisasi yang lebih sistematis serta pelatihan terkait metode penilaian aset yang lebih akurat perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sebagai rekomendasi, BPPKAD Provinsi Papua Tengah perlu memperkuat sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk memastikan bahwa proses inventarisasi dan penilaian dilakukan secara efisien dan akurat. Selain itu, pelatihan berkala bagi pegawai dalam pengelolaan aset daerah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengadopsi teknologi yang lebih canggih dalam manajemen aset guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

## Daftar Pustaka

- Ghozali, I. (2020). *Financial accounting for government entities*. Indonesian Journal of Accounting Research, 15(2), 45-60.
- Hery, S. (2022). Challenges in financial reporting of regional governments. *Journal of Finance and Policy*, 20(1), 7-15.
- Mayasari, R. (2021). The impact of asset valuation on financial report quality. *Asian Journal of Public Administration*, 18(4), 30-40.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108-115.  
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171-180.  
<https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1-6.  
<https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
- Paranoan, N., Sabandar, S. Y., Paranoan, A., Pali, E., & Pasulu, I. (2022). The Effect of Fraud Prevention, Fraud Detection, Investigative Audits, and Professionalism of Auditors on Efforts to Minimize Fraud in the Financial Statements of Companies in Makassar City, Indonesia. *WSEAS Transactions on Information Science and Applications*, 19, 54-62. <https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.6>
- Rahmawati, Y. (2020). The effect of structured inventory systems on financial statement accuracy. *Journal of Accounting Research*, 19(1), 55-70.
- Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana / Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 101-107.  
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/864/712>
- Roreng, P. P., Halik, J. B., Halik, M. Y., & Irdawati. (2024). Systematic Literature Review : Kondisi Makroekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dan Prospek di Masa Mendatang. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 56-67.  
<https://ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/306>
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Santoso, B., & Prasetyo, T. (2019). Transparency in asset valuation and public trust. *Journal of Financial Management*, 17(2), 99-120.
- Siregar, H., & Yulianti, D. (2021). Historical cost vs. fair value in public sector asset management. *International Journal of Public Sector Accounting*, 22(3), 145-163.